



SKRIPSI SALSA BILLA ADI W.-1

ID : e5cb09a04c12fca21b31f9c663ee02def0179e47



6%

Suspicious texts

File name : SKRIPSI SALSA BILLA ADI W.-1.txt  
 Original file size : 71.99 KB  
 Number of words : 6,543  
 Number of characters : 51420

Submitter : UMSIDA Perpustakaan  
 Submission date : May 8, 2026  
 Upload type : interface  
 analysis end date : May 8, 2026

### Summary (section 1/3)

Location of suspect texts in the document :



Included in the suspicious text score :

### Similarities <1%

Syntactics <1%    Semantics *Not measured*

Passages with similarities to sources found in different collections.



### AI detection 5%

Texts with stylistically similar formulations to AI-generated text.  
 This rate is an indicator, not proof. Check with the author that he/she has mastered the knowledge mentioned in the document.



### Unrecognized languages <1%

Passages in which some of the vocabulary used is not part of the language dictionary. This may be an attempt by the author to modify the text to make detection impossible.



Not included in the percentage of suspicious texts :

### Texts between quotes 11%

Passages between quotation marks, often revealing a quotation.

## Similarities

<1%

Passages with similarities to sources found in different collections.



### Source with incidental similarities

No.	Description	Similarities	Locations
1	 <b>Digital Dynamics: Nurturing Entrepreneurial Spirits in Accounting Students</b> <a href="https://dx.doi.org/10.21070/acopen.9.2024.5645">dx.doi.org/10.21070/acopen.9.2024.5645</a> 	<1%	
2	 <b>repository.unej.ac.id</b> <a href="https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/123456789/119496/3/Emilda%20Lutfiana%20...">repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/123456789/119496/3/Emilda%20Lutfiana%20...</a> 	<1%	
3	 <b>Transformasi Digital Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah...</b> <a href="https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4557">doi.org/10.55681/jige.v6i4.4557</a> 	<1%	



3



1



The Role of Educational Audits in Improving Transparency and Accountability in the Management of School Operational Assistance Funds (BOS) (Study of Muhammadiyah 1 Junior High School in Sidoarjo) [Peran Audit Pendidikan Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi pada SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo]

Salsa Billa Adi Widiarsono<sup>1)</sup>, Nur Ravita Hanun<sup>2)</sup>

1)Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2)Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: hanun@umsida.ac.id

### Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan krusial yang tidak hanya dalam perluasan pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana utama untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai tuntutan zaman. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya hal ini sehingga memberikan bantuan dalam bentuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai wujud dukungan guna meminimalkan beban biaya pendidikan dan menunjang implementasi dari pendidikan wajib 12 tahun yang berkualitas. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan keberhasilan program ini dinilai tidak hanya dari segi penyalurannya yang lancar saja, melainkan juga pada kemampuan setiap unit pendidikan dalam mengelola Dana Bos secara transparan dan akuntabel[1]. Transparansi pengelolaan Dana BOS di tingkat sekolah belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun sekolah telah menyusun laporan penggunaan dana dan melibatkan pihak internal dalam perencanaan anggaran, transparansi kepada masyarakat dan orang tua siswa masih terbatas dan sebatas pada pemenuhan kewajiban dalam pelaporan[2]. Sehingga, fungsi transparansi sebagai sarana pengawasan publik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat belum digunakan sepenuhnya. Kondisi ini terlihat dari belum optimalnya penyampaian informasi penggunaan Dana BOS kepada masyarakat secara transparan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat belum memiliki ruang yang cukup untuk mengetahui dan menilai penggunaan Dana BOS secara menyeluruh.

Selain itu, pengelolaan Dana BOS juga masih menghadapi permasalahan meskipun telah didukung oleh regulasi yang menekankan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta lemahnya pengawasan internal, sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti terdahulu terkait temuan audit dan laporan lembaga pengawas. Selain itu, hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan mengenai pengaruh transparansi pengelolaan Dana BOS menyatakan bahwa penerapan prinsip tata kelola keuangan sekolah masih belum berjalan konsisten. Fenomena ini menegaskan perlunya penguatan peran audit pendidikan sebagai sarana evaluasi dan pengawasan agar pengelolaan Dana BOS tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan[3].

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang tepat merupakan tahap krusial untuk menjamin pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang akan dikaji dan keterkaitannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Pemilihan lokasi yang tepat memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang akurat serta dapat melihat kondisi nyata pengelolaan Dana BOS di lapangan, sehingga proses pengumpulan data dapat berjalan lebih terarah. Selain itu, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana praktik transparansi dan akuntabilitas diterapkan oleh pihak sekolah. Dengan memilih lokasi yang relevan, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi sebenarnya dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran audit pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah[4].

Penelitian ini memilih SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo sebagai lokasi penelitian di dasarkan dengan dua pertimbangan utama. Pertama, sekolah tersebut telah menerima pendampingan intensif dari dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk memperkuat tata kelola keuangan, termasuk pelatihan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan pengenalan deteksi dini potensi fraud. Kedua, sekolah ini meraih predikat Outstanding school pada Muhammadiyah Education Awards, yang menunjukkan keunggulannya dalam aspek manajemen, layanan pendidikan, dan mutu tata kelola. Track Record ini menunjukkan komitmen sekolah yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, sehingga relevan untuk mengkaji peran audit berkontribusi dalam pengelolaan Dana BOS di berbagai unit pendidikan yang telah berusaha menerapkan standar pengelolaan keuangan yang baik.

Meski demikian, berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan belum sepenuhnya sejalan dengan Realita yang ada di lapangan. Pengelolaan Dana BOS masih dihadapkan dengan sejumlah persoalan. Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 mengungkapkan adanya indikasi bahwa beberapa sekolah



menggunakan Dana BOS tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan serta laporan keuangan yang tidak merefleksikan kondisi sesungguhnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa beberapa sekolah masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi. Selain itu, proses pencatatan dan pelaporan di sejumlah unit pendidikan seringkali tidak dikerjakan secara menyeluruh, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi tidak konsisten.

Proporsi Jenis Penyalahgunaan Dana Bos (Survei KPK 2024)

12%
17%
47%
40%
42%

Penggelembungan Biaya  
Manipulasi Laporan Keuangan Nepotisme Dalam Pengadaan Potongan/Pungutan Dana BOS  
Dana BOS Tidak Sesuai Peruntukan

Proporsi Jenis Penyalahgunaan Dana Bos (Survei KPK 2024)

12%
17%
47%
40%
42%

Penggelembungan Biaya  
Manipulasi Laporan Keuangan Nepotisme Dalam Pengadaan Potongan/Pungutan Dana BOS  
Dana BOS Tidak Sesuai Peruntukan

Gambar 1. Proporsi Penyalahgunaan Dana Bos  
Sumber: infopublik.id (2025)

Diagram lingkaran tersebut (gambar 1) menunjukkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil survei menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan terbesar dalam pengelolaan Dana BOS adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, mencapai 47%, kemudian terdapat manipulasi laporan keuangan sebesar 42% dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa sebesar 40%. Permasalahan lainnya, potongan atau pungutan pada Dana BOS masih terjadi 17% di sekolah, sementara penggunaan Dana BOS tidak sesuai peruntukkan tercatat sebesar 12%. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya akuntabilitas maupun transparansi pengelolaan Dana BOS masih menghadapi tantangan yang

signifikan, sehingga masih memerlukan perbaikan dalam mekanisme pengawasan dan pelaporan yang lebih terbuka[5].

Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran Dana BOS di Jawa Timur yang telah digambarkan melalui (gambar 2.) selama tahun 2020 – 2025 menunjukkan adanya perubahan baik dari sisi jumlah maupun pola pencairan. Pada tahun 2020, dana disalurkan dalam 3 tahap, yaitu (tahap 1) Rp 399.949.770.000, (tahap 2) Rp 533.266.360.000, dan (tahap 3) Rp 398.556.510.000, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 433.741.536.000 pada tahap 1, Rp 579.187.804.000 pada tahap 2, dan Rp 436.675.752.000 pada tahap 3. Selanjutnya pada tahun 2022 relatif stabil dengan rincian (tahap 1) Rp 435.070.824.000, (tahap 2) Rp 560.791.442.479, dan (tahap 3) Rp 433.974.504.945. Namun mulai tahun 2023 terjadi perubahan menjadi 2 tahap dengan nominal yang lebih besar, yaitu (tahap 1) Rp 711.669.540.291 dan (tahap 2) Rp 719.547.713.600, yang kemudian berlanjut pada tahun 2024 sebesar Rp 723.204.175.000 pada tahap 1 dan Rp 718.378.275.184 pada tahap 2, serta tahun 2025 sebesar Rp 723.488.624.099 pada tahap 1 dan Rp 719.706.078.486 pada tahap 2. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa alokasi Dana BOS tidak hanya mengalami peningkatan, tetapi juga disertai penyederhanaan dalam proses penyalurannya.

Perubahan jumlah maupun pola penyaluran dana tersebut mengindikasikan bahwa alokasi Dana BOS tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebelum akhirnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan mulai tahun 2023. Kondisi semacam ini turut berdampak pada tata kelola keuangan di sekolah, terutama dalam menyesuaikan perencanaan anggaran terhadap besaran dana yang diterima. Bertambahnya alokasi pada periode terbaru ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam menjalankan proses pembelajaran, termasuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan[6]. Namun demikian, seiring dengan peningkatan dana yang diterima sekolah, semakin besar pula tanggung jawab sekolah dalam memastikan pengelolaan dana tersebut secara transparan maupun akuntabel, agar dampak positif dari program Dana BOS dapat menjangkau seluruh peserta didik[7].

Perubahan dari tiga tahap menjadi dua tahap pada tahun 2023 terjadi karena kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan percepatan penyaluran Dana BOS kepada sekolah. Dalam kebijakan tersebut,

penyaluran dana disederhanakan agar sekolah dapat menerima dana lebih cepat, terutama pada awal tahun anggaran untuk mendukung kegiatan operasional. Selain itu, pengurangan tahapan bertujuan untuk meminimalkan keterlambatan pencairan yang sering terjadi pada tahap ketiga pada sistem sebelumnya. Kebijakan ini juga mempermudah proses administrasi serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pengawasan dana. Dengan demikian, sistem dua tahap dinilai lebih efektif dalam mendukung pengelolaan Dana BOS yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel[8].

398,5  
Tahap 1Tahap 2Tahap 3  
433  
433,9  
300  
200  
100  
0  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
399,9  
400  
436,6435  
500  
560,7  
533,2  
579  
700  
600  
723,4 719,7  
711,6 719,5723,2 718,3  
800  
Rincian Dana BOS Per Tahap (2020 - 2025) - Jawa Timur

398,5  
Tahap 1Tahap 2Tahap 3  
433  
433,9  
300  
200  
100  
0  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
399,9  
400  
436,6435  
500  
560,7  
533,2  
579  
700  
600  
723,4 719,7  
711,6 719,5723,2 718,3

## Gambar 2. Data Dana BOS

Sumber: Sistem Informasi BOSP Salur (2025)

Dalam hal tersebut, audit pendidikan memegang peran penting dalam memastikan bahwa penggunaan Dana BOS diharuskan untuk lebih transparan dan akuntabel. Namun, hasil peneliti terdahulu menunjukkan bahwa sekolah swasta masih belum banyak mendapat perhatian dalam kajian terkait pelaksanaan peran audit dalam pengelolaan Dana BOS. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [9] menyatakan bahwa audit internal berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar dan ketentuan penggunaan dana melalui proses pemeriksaan dan pengawasan yang sistematis. Meski demikian, penelitian ini masih berfokus pada aspek prosedural audit, sehingga belum memberikan gambaran tentang bagaimana praktik audit Pendidikan dapat membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di sekolah.

Sementara itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [10] menunjukkan bahwa pelaksanaan audit memiliki dampak positif dalam menambah tingkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS. Namun, penelitian tersebut bersifat tinjauan literatur yang menekankan pada hasil penelitian sebelumnya tanpa memberikan gambaran nyata mengenai implementasi peran audit ditingkat unit pendidikan, terutama di sekolah swasta berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah, penelitian mengenai persoalan ini masih belum banyak dikaji. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam penelitian, yaitu kurangnya studi yang secara langsung mengkaji bagaimana audit pendidikan dapat meningkatkan transparansi maupun akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di sekolah swasta.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, terlihat bahwa peneliti terdahulu masih kurang menyoroti peran audit pendidikan dalam menambah tingkatan transparansi maupun akuntabilitas Dana BOS di sekolah, khususnya yang berbasis keagamaan. Peneliti terdahulu lebih banyak berfokus pada pengawasan prosedural dan mekanisme kepatuhan [11]. Oleh karena itu, penerapan Stewardship Theory relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran audit pendidikan. Peneliti terdahulu menggunakan Stewardship Theory karena penelitian tersebut menekankan bahwa pengelolaan Dana BOS harus dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan pedoman yang telah berlaku [12].

Merujuk pada peneliti terdahulu yang menggunakan Stewardship Theory, teori tersebut relevan dengan penelitian ini karena untuk menelaah pengelolaan Dana BOS yang dimana sebagai bentuk kepercayaan publik mengadopsi teori tersebut dengan pertimbangan bahwa teori tersebut sesuai untuk menganalisis pengelolaan. Dengan teori ini, peneliti tidak hanya fokus pada kepatuhan terhadap aturan administrasi, tetapi juga dapat melihat bagaimana komitmen etis para pengelola dana yang dijalankan. Melalui perspektif teori ini, maka pengelolaan Dana BOS dapat dikaji dari berbagai sisi penting, seperti ketepatan alokasi, transparansi pelaporan, serta kontribusinya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas pengelola sebagai faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Dengan melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis perilaku pengelola secara komprehensif dalam pengelolaan dana guna mencapai tujuan pendidikan.

Mengingat adanya kesenjangan tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan. Minimnya penelitian sebelumnya mengenai sekolah swasta berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah memperkuat urgensi penelitian ini, karena memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam peran audit pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah swasta [13]. Sejalan dengan urgensi tersebut, penelitian ini berfokus pada peran audit pendidikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Adapun dalam manfaat teoritisnya, diharapkan temuan ini mampu memperluas wawasan mengenai audit pendidikan di sekolah swasta berbasis agama, dengan menekankan pentingnya audit dalam mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas yang efektif [14]. Sementara secara praktis, diharapkannya temuan ini mampu menjadi rujukan bagi berbagai unit sekolah dalam meningkatkan pengelolaan Dana BOS agar lebih transparan maupun akuntabel [15]. Sehingga, peneliti tertarik guna mengkaji lebih rinci melalui penelitian berjudul "Peran Audit Pendidikan Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo."

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjawab bagaimana peran audit pendidikan dalam meningkatkan transparansi maupun akuntabilitas pengelolaan Dana BOS [16]. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses audit mekanisme pertanggungjawaban, serta aspek pengelolaan Dana BOS yang berkaitan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sekolah [17]. Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat memperoleh gambaran mendalam mengenai pelaksanaan audit, menggali informasi dengan berbagai pihak yang terkait, serta melihat sejauh mana

prinsip transparansi maupun akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan Dana BOS.

Dalam temuan ini, peneliti mengadopsi teknik triangulasi sumber yang dipergunakan agar memastikan validitas data. Teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang terlibat dalam pengelolaan maupun pengauditan Dana BOS, serta memverifikasi dengan dokumen resmi, seperti laporan penggunaan Dana BOS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), hasil audit, dan ketentuan kebijakan sekolah[18]. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat konsistensi antara pernyataan informan dengan

kondisi di lapangan dan bukti dokumen pendukung sekolah. Sehingga data yang diperoleh valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, triangulasi sumber membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana audit pendidikan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas Dana BOS[19].

Data penelitian diperoleh melalui data primer maupun sekunder. Data primer dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait langsung dalam proses pengelolaan Dana BOS seperti, kepala sekolah, kepala keuangan, maupun bendahara Dana BOS sebagai pihak internal. Adapun pihak eksternal yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah auditor dari Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo dan disajikan dalam (tabel 1). Sebagai lembaga struktural di dalam Muhammadiyah, LPPK bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan verifikasi keuangan terhadap Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), yang di dalamnya mencakup sekolah-sekolah yang menjadi objek penelitian. Auditor LPPK memiliki peran krusial dalam memantau pengelolaan anggaran, memeriksa keakuratan pencatatan dan pelaporan, serta memastikan bahwa proses keuangan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan[20].

Seluruh proses wawancara tersebut dilakukan secara semi-terstruktur, yang dimana pendekatannya tidak sepenuhnya terikat pada daftar pertanyaan dan peneliti secara bebas melakukan wawancara, namun tetap berpegang pada topik inti yang telah ditetapkan sebagai fokus penelitian[21]. Pendekatan ini dilakukan guna memberikan keleluasan kepada informan dalam menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka mengenai transparansi maupun akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS[22]. Demikian pula pada observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai implementasi sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah[23].

Penelitian ini menyajikan tabel informan untuk menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses wawancara beserta perannya dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Informan terdiri dari kepala sekolah, bendahara dana BOS, kepala keuangan, dan auditor yang dipilih karena memiliki keterlibatan langsung serta memahami proses pengelolaan dan pengawasan dana. Pencantuman inisial nama dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas informan tanpa mengurangi kejelasan informasi yang disampaikan. Melalui keterlibatan beberapa informan dengan posisi yang berbeda, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi[24]. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Data informan dapat dilihat sebagaimana berikut.

Tabel 1. Data Informan

No Nama Informan Jabatan

1 E.H Kepala Sekolah

2 C.H Bendahara Dana BOS

3 Y.A.R Kepala Keuangan

4 D.D.O.R Auditor LPPK

Sumber: Dibuat oleh Peneliti

Adapun data sekunder yang melengkapi penelitian ini berasal dari dokumentasi resmi yang mencakup catatan pelaksanaan pengelolaan dan laporan hasil audit Dana BOS, yakni Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Laporan Pengelolaan Keuangan Dana BOS, Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS, maupun dokumen hasil audit. Selain menggunakan dokumen internal, penelitian ini juga menggunakan jurnal dan literatur yang relevan untuk mendukung analisis teoritis. Seluruh data sekunder tersebut digunakan untuk memverifikasi informan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, serta untuk menilai kepatuhan dalam pengelolaan Dana BOS dengan ketentuan yang berlaku[25]. Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk membuktikan temuan di lapangan dan mengevaluasi sejauh mana pengelolaan Dana BOS telah sesuai dengan kebijakan yang sebelumnya telah ditentukan. Dengan mengombinasikan antara data primer dengan data sekunder, temuan ini mampu memberikan pemahamannya yang lebih menyeluruh dan kredibel mengenai mekanisme pengelolaan serta audit Dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo.

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Tahapan tersebut diawali dengan identifikasi masalah untuk menentukan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan pertanyaan penelitian agar arah penelitian menjadi jelas. Setelah itu, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam proses pengolahan dan analisis data, temuan ini mengadopsi Teknik analisis Miles dan Huberman yang

dimana mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan[26]. Reduksi data dilakukan melalui proses seleksi, pengelompokan, dan penyederhanaan data untuk mengidentifikasi pola dan fokus penelitian, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif serta matriks temuan untuk memperjelas hubungan antar data, sementara penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan selama proses penelitian[27], berikut merupakan flowchart yang disajikan untuk menggambarkan alur tahapan penelitian secara keseluruhan.

### Gambar 3. Tahapan Penelitian

Sumber: Dibuat oleh Peneliti

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tolak ukur sebagai dasar analisis untuk mengevaluasi kontribusi audit pendidikan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Audit pendidikan dianggap efektif apabila mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menjamin kepatuhan terhadap regulasi Dana BOS, memberikan rekomendasi bagi perbaikan, maupun mencegah potensi fraud dalam pengelolaan Dana BOS[28]. Dengan kerangka analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan akurat mengenai peran audit pendidikan dalam memperkuat sistem pengelolaan Dana BOS di lingkungan sekolah.

### Hasil dan Pembahasan

#### Profil SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo

SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di tingkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) melalui Majelis Dikdasmen Kabupaten Sidoarjo. Sekolah ini merupakan salah satu bentuk Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Sekolah ini didirikan pada tahun 1974 dan memiliki izin operasional sejak 09 Januari 2007[29]. Lingkungan sekolah juga cukup kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi, siswa diberikan fleksibilitas untuk belajar secara lebih santai, interaktif, dan menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran[30]. SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan tenaga pendidik yang kompeten. Proses

pembelajaran di sekolah ini berlangsung secara interaktif dan menyenangkan dengan memanfaatkan berbagai metode dan media pembelajaran. Penggunaan berbagai strategi dan media digital terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Selain itu, metode seperti diskusi dan presentasi mendorong siswa untuk lebih aktif serta berfikir kritis dalam memahami materi[31]. Dengan demikian, lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif berperan penting dalam meningkatkan kualitas belajar siswa secara optimal.

Pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah, yaitu selama lima hari dalam satu minggu. Selain itu, SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo juga telah memperoleh akreditasi "A" yang menunjukkan kualitas pendidikan yang unggul. Akreditasi tersebut diberikan berdasarkan sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Nomor SK: 1347/BAN-SM/SK/2021 pada tanggal 08 Desember 2021 sebagai bentuk penilaian terhadap mutu sekolah. Capaian tersebut mencerminkan bahwa proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Berikut ini adalah identitas dari Satuan Pendidikan:

Nama Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo NPSN20537100

Status Sekolah: Swasta

Jenjang Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama Akreditasi Sekolah: Terakreditasi "A"

Alamat: Jl. Samanhudi No. 81, Jasem, Bulusidokare

Kecamatan: Sidoarjo

Kabupaten: Sidoarjo

Provinsi: Jawa Timur

Kode Pos 61216

Waktu Penyelenggara: 5 Hari/Pagi – Sore Hari (jam tiga) No. Telepon/Fax: (031) - 8921666

Motto, Visi dan Misi SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo

Motto SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo

"The School of Life, Musasi Keren dan Be Success".

Visi SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo

Islami, cerdas, dan berprestasi.

Misi SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo

Menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Meningkatkan kualitas pembelajaran yang aktif dan inovatif.

Mengembangkan potensi akademik dan non-akademik siswa.

Mencetak siswa yang berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi melalui pembelajaran efektif yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, disiplin, etos kerja, dan keterampilan hidup.

Analisis Data dan Hasil Penelitian Peran Audit Pendidikan

Audit merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem pengendalian keuangan, khususnya dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam hal ini, auditor memiliki peran yang tidak terbatas pada fungsi pemeriksaan, melainkan mencakup fungsi pengawasan, pemberian keyakinan (assurance), konsultasi, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan sekolah. Peran tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan secara transparan dan akuntabel[32]. Selain itu, audit juga membantu mengidentifikasi potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam penggunaan dana. Oleh karena itu, keberadaan auditor berperan dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan sekolah yang lebih efektif serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Peran watchdog tercermin dari proses audit yang mengawasi apakah pengelolaan dana BOS sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen dan menggunakan indikator sebagai acuan untuk menilai pengelolaan keuangan sekolah. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap penggunaan dana telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, auditor juga dapat mengidentifikasi adanya potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana. Hal ini terlihat dari berbagai indikator yang digunakan auditor untuk menilai pengelolaan dana BOS secara lebih mendetail[33]. Sebagaimana disampaikan oleh Auditor LPPK:

“Indikator yang digunakan auditor dalam menilai pengelolaan dana BOS, yaitu kepatuhan pada juknis dari Kemendikdasmen, transparansi (laporan terbuka dan dapat diakses), keandalan laporan (sesuai fakta dan didukung bukti), efektivitas pengendalian internal (pemisahan tugas dan prosedur jelas), efisiensi penggunaan

dana, ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan administrasi, serta tidak adanya indikasi penyimpangan.”  
(Wawancara tanggal 11 Maret 2026)

Sementara peran assurance ditunjukkan melalui proses penyampaian hasil audit yang bertujuan memberikan keyakinan kepada pihak sekolah bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku[34]. Proses ini dilakukan secara transparan melalui pelaksanaan exit meeting serta didahului dengan komunikasi antara auditor dan pihak sekolah. Dalam tahapan ini, auditor menyampaikan hasil audit secara sistematis agar dapat dipahami dengan baik oleh pihak terkait. Selain itu, komunikasi yang dilakukan sebelum exit meeting berfungsi untuk memberikan penjelasan atas temuan serta melengkapi informasi yang belum memadai. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi dan konfirmasi yang dilakukan auditor sebelum pelaksanaan exit meeting, sebagaimana disampaikan oleh informan 4 berikut:

“Penyampaian hasil audit kepada pihak sekolah dilakukan pada sesi Exit Meeting yang diselenggarakan oleh LPPK PDM, dengan mengundang pihak sekolah dan pihak-pihak PCM & PDM yang terkait. Tetapi sebelum exit meeting, pada saat audit lapangan terakhir auditor akan melakukan komunikasi dan konfirmasi pada pihak sekolah terkait beberapa temuan yang belum didapatkan informasinya sampai dengan hari terakhir audit lapangan, serta memberikan gambaran atas beberapa rekomendasi.” (Wawancara Tanggal 11 Maret 2026)

Peran consulting terlihat ketika auditor memberikan rekomendasi perbaikan serta pendampingan kepada pihak sekolah apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana BOS. Auditor tidak hanya menemukan kesalahan, tetapi juga membantu memberikan solusi. Dalam hal ini, auditor berperan aktif dalam memberikan arahan agar pengelolaan keuangan dapat diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, auditor juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa peran consulting tidak hanya sebatas pada pemberian rekomendasi, tetapi juga berlanjut pada proses pendampingan secara berkelanjutan[33], sebagaimana disampaikan oleh auditor LPPK berikut:

“Dalam menindaklanjuti ketidaksesuaian dana BOS dengan menyusun temuan audit (kondisi, kriteria, sebab, akibat), mengkomunikasikannya kepada pihak sekolah, lalu meminta klarifikasi dan bukti tambahan; jika terbukti terjadi pelanggaran, auditor merekomendasikan perbaikan, pengembalian kerugian, atau sanksi sesuai ketentuan dari Kemendikdasmen, serta melakukan pendampingan & pemantauan tindak lanjut hingga masalah dinyatakan selesai.” (Wawancara Tanggal 11 Maret 2026)

Adapun peran catalyst yang bisa dilihat dari cara auditor dalam mendorong sekolah untuk terus memperbaiki serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekolah. Dorongan ini dilakukan misalnya dengan memantau sejauh mana sekolah dalam menindaklanjuti hasil audit dan memberikan pendampingan jika diperlukan. Peran ini menekankan bahwa auditor tidak hanya berfokus pada temuan, tetapi juga pada perubahan setelah dilakukannya audit. Dalam hal ini, auditor berupaya memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar diimplementasikan oleh pihak sekolah. Selain itu, auditor juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan perbaikan yang telah dilakukan[33]. Hal ini menunjukkan bahwa auditor berperan aktif dalam mendorong peningkatan kualitas tata

kelola keuangan secara berkelanjutan, sejalan dengan pernyataan auditor LPPK berikut:

“Pemantauan yang dilakukan oleh auditor pada tindak lanjut rekomendasi dengan meminta laporan progres dari sekolah, memverifikasi bukti perbaikan (dokumen, transaksi, atau sistem), melakukan audit lanjutan atau monitoring berkala, serta membandingkan realisasi perbaikan dengan rekomendasi awal.” (Wawancara Tanggal 11 Maret 2026)

Pada SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo tidak terdapat adanya temuan audit yang signifikan terkait dana BOS. Hal ini menandakan bahwa sistem pengelolaan keuangan di sekolah tersebut telah berjalan dengan baik serta sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari adanya pemisahan pencatatan dana BOS dari laporan keuangan sekolah yang membuat proses audit berjalan lebih tertib. Oleh karena itu, auditor tidak memberikan rekomendasi khusus terkait pengelolaan dana BOS pada periode audit tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh auditor LPPK berikut:

“Karena pencatatan dana BOS sudah dilakukan terpisah dari laporan keuangan sekolah, maka pada saat periode saya meng-audit tidak ada rekomendasi yang diberikan untuk dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo.” (Wawancara Tanggal 11 Maret 2026)

Sejalan dengan hal tersebut, tidak ditemukannya hal yang menjadi perhatian atau temuan audit juga berdampak pada tidak dilakukannya pemantauan lebih lanjut terhadap dana BOS. Hal ini karena pencatatan dan penyajian laporan telah dilakukan secara baik dan wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh auditor LPPK berikut:

“Untuk SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo, karena tidak ditemukan adanya hal penting yang menjadi perhatian atau bahkan temuan audit, maka untuk dana BOS tidak dilakukan pemantauan karena sudah dilakukan pencatatan dan penyajian dengan baik dan wajar.” (Wawancara Tanggal 11 Maret 2026)

Hasil wawancara mengenai peran audit pendidikan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terungkap bahwa proses audit bertujuan untuk menjamin bahwa dana tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel. Auditor menjalankan tugasnya dengan memeriksa dokumen dan mengacu pada indikator penilaian guna menilai kesesuaian pengelolaan keuangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, hasil penilaian tersebut menjadi dasar bagi auditor untuk memberikan rekomendasi. Akan tetapi, di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo tidak ditemukan temuan audit yang signifikan, sehingga tidak diperlukan rekomendasi ataupun tindak lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi audit untuk memastikan dan memberikan keyakinan bahwa pengelolaan dana telah dilakukan dengan baik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa audit yang dilakukan terhadap pengelolaan dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo lebih dominan sebagai peran assurance, yaitu auditor lebih berperan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan [35] dan [36] yang menyatakan bahwa peran auditor di era digital lebih mengarah pada peran assurance. Peran tersebut terlihat dari kegiatan pemeriksaan dokumen, penggunaan indikator penilaian, serta penyampaian hasil audit melalui exit meeting yang diawali dengan komunikasi dan konfirmasi kepada pihak sekolah. Proses audit ini menunjukkan bahwa auditor tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga menilai apakah pengelolaan dana sudah dilakukan dengan benar. Selain itu, tidak ditemukannya temuan audit yang signifikan menunjukkan bahwa pengelolaan dana telah berjalan secara transparan, terstruktur, sesuai aturan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan dana BOS yang bertujuan agar seluruh proses keuangan dapat diketahui, diawasi, dan dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait[37]. Transparansi tidak hanya ditunjukkan melalui laporan keuangan, tetapi juga melalui sistem pengawasan internal dan eksternal yang terintegrasi. Hal ini mencakup keterbukaan informasi mulai dari pihak pengelola, pengawas, dan wali murid. Selain itu, penggunaan teknologi juga berperan sebagai pendukung dalam meningkatkan keterbukaan pengelolaan dana. Oleh karena itu, aspek transparansi merupakan hal yang krusial untuk memastikan bahwa akuntabilitas keuangan sekolah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo mengungkapkan bahwa transparansi pengelolaan dana BOS di sekolah telah dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan tidak hanya digunakan secara internal, tetapi juga diaudit oleh lembaga yang berwenang serta disampaikan kepada wali murid sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Hal ini menandakan adanya keterbukaan informasi yang cukup baik dalam pengelolaan dana BOS. Keterbukaan tersebut juga merupakan bagian dari usaha sekolah untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangannya. Dengan demikian, transparansi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga diterapkan dalam praktik pelaporan dan penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan.

Sebagaimana dijelaskan oleh bendahara dana BOS berikut:

“Transparansi dana BOS sudah sangat terbuka, di mana laporan dapat dilihat oleh siapapun dan juga diaudit oleh Dinas Pendidikan Kabupaten serta pimpinan cabang Muhammadiyah dan juga diumumkan kepada wali murid.” (Wawancara Tanggal 26 Februari 2026)

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS tidak hanya didukung oleh sistem pengadaan barang dan jasa yang diawasi melalui aplikasi terintegrasi pemerintah pusat, tetapi juga diperkuat dengan penggunaan sistem pencatatan keuangan berbasis aplikasi. Dalam proses pengadaan, setiap pembelian dengan nilai tertentu wajib memiliki pembanding agar penggunaan dana lebih terkontrol dan terhindar dari penyimpangan, sehingga seluruh proses menjadi lebih terbuka dan dapat dipantau secara langsung. Hal ini sejalan dengan penggunaan aplikasi SIPLA yang memastikan bahwa mekanisme pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan diawasi secara sistematis oleh pemerintah. Di sisi lain, transparansi juga diperkuat melalui aplikasi SIASMU yang digunakan sekolah dalam pencatatan keuangan, sehingga pihak eksternal seperti PCM, BCM, dan PDM dapat mengakses serta memeriksa transaksi dan laporan keuangan. Dengan adanya integrasi kedua sistem tersebut, pengelolaan dana BOS menjadi lebih akuntabel, mudah diaudit, dan memberikan jaminan keterbukaan informasi bagi seluruh pihak terkait.

Sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan bendahara dana BOS berikut:

“Dalam aturan dana BOS, pembelian senilai sekian sampai sekian harus memiliki pembanding, apalagi saat ini menggunakan SIPLA sebagai aplikasi pengadaan barang dan jasa yang diawasi pemerintah pusat, sehingga seluruh proses menjadi lebih transparan dan lengkap.” (Wawancara Tanggal 26 Februari 2026)

Adapun pernyataan yang sejalan dengan hal tersebut, yakni:

“Sekolah telah menggunakan aplikasi SIASMU dalam pencatatan keuangan, sehingga pihak eksternal seperti PCM, BCM, dan PDM dapat mengakses dan memeriksa transaksi serta laporan keuangan. Hal ini mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah.” (Wawancara Tanggal 26 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo, transparansi pengelolaan dana BOS telah dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan internal sekolah, tetapi juga diaudit oleh lembaga terkait serta disampaikan kepada wali murid sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Selain itu, transparansi juga didukung oleh penggunaan aplikasi SIPLA dalam proses pengadaan barang dan jasa serta aplikasi SIASMU dalam pencatatan keuangan, sehingga seluruh proses dapat dipantau dan diperiksa oleh pihak internal maupun eksternal. Adanya kewajiban pembanding dalam pengadaan serta penerapan sistem pencatatan berbasis aplikasi, dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana BOS telah diterapkan secara nyata dalam praktik di sekolah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo tidak hanya formalitas, tetapi telah menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan yang baik. Keterbukaan akses informasi dan penggunaan teknologi memungkinkan pengawasan rutin oleh berbagai pihak. Hal ini menandakan bahwa sistem pengendalian yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung akuntabilitas keuangan sekolah. Selain itu, transparansi yang dilakukan juga berperan dalam meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam penggunaan dana. Dengan demikian, transparansi tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga

berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah.

#### AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS merupakan bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap penggunaan dana yang telah diterima. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pengeluaran harus dilaporkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam praktiknya, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga melibatkan sistem pengawasan yang memastikan tidak terjadi penyimpangan[37]. Hal ini diperkuat dengan penggunaan teknologi yang terhubung langsung dengan sistem pusat, sehingga akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan keterangan informan, bahwa saat ini pengelolaan dana BOS sudah didukung oleh aplikasi yang terhubung secara langsung dengan pusat secara real time. Dengan adanya sistem ini, setiap transaksi yang dilakukan sekolah dapat dipantau dan dilaporkan secara berkala tanpa terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi. Selain itu, sistem tersebut juga berfungsi sebagai alat pengendalian agar tidak terjadi perbedaan antara barang yang dibeli dan yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas keuangan telah berada dalam pengawasan sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, peluang terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaporan dapat diminimalisir secara signifikan.

Seperti yang diungkapkan oleh bendahara dana BOS berikut:

“Praktik yang tidak sesuai, seperti perbedaan antara barang yang dibeli dan yang dilaporkan tidak bisa diupload, dan hal tersebut tidak akan terjadi karena sistem sudah terhubung dengan pusat. Melalui aplikasi yang terhubung langsung dengan pusat secara real time, setiap transaksi dapat dipantau, dilaporkan secara berkala, dan segeraditegur jika pelaporan tidak sesuai.” (Wawancara Tanggal 26 Februari 2026)

Berdasarkan temuan tersebut, akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS tidak hanya terlihat dari penyusunan laporan keuangan, tetapi juga dari adanya sistem pengendalian yang berjalan secara rutin. Penggunaan aplikasi

yang terhubung langsung dengan pusat menunjukkan bahwa proses pelaporan dilakukan secara terbuka, terstruktur, dan dapat dipantau setiap saat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sistem yang terintegrasi juga berperan dalam mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam penggunaan dana. Dengan demikian, akuntabilitas yang diterapkan tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah.

#### PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Pengelolaan dana BOS di sekolah dilakukan melalui tahapan yang terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses ini tidak dilakukan secara langsung, tetapi berbasis pada data dan kebutuhan nyata sekolah. Salah satu dasar utama dalam perencanaan adalah hasil rapor pendidikan yang berasal dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Dari hasil tersebut kemudian disusun Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang menjadi acuan dalam menentukan prioritas program[38]. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS diupayakan agar lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan nyata di sekolah.

Berdasarkan hasil dari wawancara, diketahui bahwa dalam perencanaan dana BOS dengan menjadikan hasil

evaluasi dari rapor pendidikan sebagai bahan pertimbangan. Data tersebut digunakan untuk menentukan prioritas kebutuhan yang perlu segera diatasi oleh sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana tidak dilakukan secara merata, tetapi didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan yang paling mendesak.

Seperti yang dijelaskan oleh kepala sekolah:

“Dari rapor tersebut kemudian disusun perencanaan berbasis data (PBD), sehingga perencanaan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan kebutuhan yang nyata. Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) muncul yang nantinya menjadi rapor pendidikan, dari situ nanti akan muncul rekomendasi prioritas.”

(Wawancara Tanggal 26 Februari 2026)

Selain itu, dalam pengelolaan dana BOS juga diterapkan prinsip keadilan dalam kebutuhan, bukan pembagian yang sama rata. Setiap sumber dana memiliki ketentuan dan alokasi penggunaannya tersendiri, sehingga tidak semua jenis kegiatan dapat dibiayai dengan dana BOS. ketika suatu kegiatan tidak memenuhi kriteria untuk didanai dari BOS, maka pembiayaannya akan dialihkan ke sumber dana lain yang lebih sesuai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara fleksibel, tetapi tetap mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Dengan cara demikian, setiap program sekolah tetap dapat berjalan sesuai dengan sumber pembiayaan yang tepat.

Sejalan dengsn pernyataan kepala sekolah, yaitu:

“Untuk beberapa sumber seperti SPP, memang sudah ada persentase tertentu untuk masing-masing kebutuhan, sedangkan dana BOS harus mengikuti kode arkas yang berlaku. Jika suatu kegiatan tidak dapat dibiayai dari BOS, maka akan dialihkan ke sumber dana lain. Jadi, keadilan dalam perencanaan keuangan tidak diartikan sebagai pembagian yang sama rata, tetapi berdasarkan kebutuhan dan prioritas sekolah agar setiap program mendapatkan pembiayaan yang sesuai.” (Wawancara Tanggal 26 Februari 2026)

Dalam proses pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS juga memperhatikan skala prioritas ketika terjadi keterbatasan anggaran. Apabila terdapat pengajuan yang melebihi batas, maka dilakukan penyesuaian dengan mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak. Kegiatan yang belum terlalu penting dapat ditunda pelaksanaannya ke tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS bersifat selektif dan berbasis urgensi kebutuhan. Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah berikut:

“Saat menyusun rencana keuangan, kalau ada pengajuan yang melebihi batas atau overload, maka akan dilakukan reduksi dengan mendahulukan yang benar-benar urgent atau prioritas. Kebutuhan yang dianggap belum terlalu mendesak bisa ditunda pelaksanaannya ke tahun berikutnya. Jadi yang paling menjadi pertimbangan itu adalah skala prioritas berdasarkan kebutuhan yang ada di rapor pendidikan, karena dari situ lah terlihat mana yang harus segera dibenahi.” (Wawancara Tanggal 26 Februari 2026)

Proses pengelolaan dana BOS diawali dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang melibatkan seluruh komponen sekolah. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan, kelebihan, dan kebutuhan sekolah secara menyeluruh. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti pimpinan, guru, dan komite sekolah membuat perencanaan lebih partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut penjelasan dari bendahara dana BOS:

“Perencanaan dana BOS diawali dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang melibatkan seluruh komponen sekolah untuk mengetahui kekurangan, kelebihan, dan kebutuhan sekolah. Tetapi di tahun terakhir, sekolah dipermudah dengan adanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu yang mengeluarkan adalah pemerintah pusat.” (Wawancara Tanggal 26 Februari 2026)

Selain itu, dalam pengelolaan dana BOS juga dilakukan diskusi bersama untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran. Jika terdapat sisa anggaran, maka penggunaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS bersifat fleksibel namun tetap berada dalam ketentuan aturan. Seperti yang diungkapkan oleh bendahara dana BOS berikut:

“Jika terdapat sisa anggaran, misalnya dari pembayaran listrik yang lebih kecil dari yang direncanakan, maka saldo tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang bersifat dinamis, selama tetap sesuai dengan ketentuan.”

(Wawancara Tanggal 26 Februari 2026)

Pada tahap penetapan RKAS, pengelolaan dana BOS dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak sekolah. Hasil perencanaan kemudian disepakati bersama sebelum ditetapkan menjadi RKAS sebagai pedoman penggunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan secara bersama dan terstruktur. Proses tersebut juga bertujuan untuk memastikan setiap kebutuhan sekolah telah dipertimbangkan secara bersama-sama. Dengan demikian, RKAS yang ditetapkan dapat menjadi acuan yang lebih tepat dalam pelaksanaan anggaran. Sejalan dengan pernyataan oleh kepala keuangan, yakni:

Page | 13

99

"Disusun dan diajukan ke kepala sekolah dan dievaluasi bersama kepala sekolah, kepala keuangan, dan bendahara dana BOS. Setelah itu, diputuskan kalau memang disetujui, dikurangi, atau ditambah. Di situ dirapatkan dan menjadi RKAS. Jadi, insyaa Allah sudah membuat berdasarkan kebutuhannya masing-masing." (Wawancara Tanggal 26 Februari 2026)

Pengendalian juga dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran sesuai dengan RKAS yang telah ditetapkan. Setiap pengajuan anggaran harus sesuai dengan mata anggaran yang berlaku dan sumber dana yang digunakan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka akan dilakukan konfirmasi dan penyesuaian oleh pihak sekolah. Hal ini dilakukan agar penggunaan dana tetap sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, pengendalian berperan penting dalam menjaga ketertiban dan kesesuaian pelaksanaan anggaran di sekolah.

Berikut penjelasan dari kepala keuangan:

99

"Pengendalian dilakukan dengan mengacu pada RKAS yang telah disusun. Setiap pengajuan anggaran harus sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan dan sumber dananya dari mana. Jika terdapat pengajuan yang melebihi nominal yang ada di RKAS, maka akan dilakukan konfirmasi dan penyesuaian dengan pihak terkait, khususnya kepala sekolah." (Wawancara Tanggal 26 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pengelolaan dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo dilakukan melalui tahapan yang terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pengelolaan dana disusun berdasarkan data rapor pendidikan dari ANBK. Data tersebut kemudian digunakan dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk menentukan prioritas kebutuhan sekolah. Dalam pelaksanaannya, penggunaan dana dilakukan secara selektif dengan mengutamakan kebutuhan mendesak serta menyesuaikan dengan ketentuan sumber dana yang berlaku. Proses ini melibatkan berbagai pihak melalui musyawarah dalam penyusunan RKAS. Selain itu, ada mekanisme pengendalian yang bertugas menjamin bahwa tidak ada pengeluaran yang menyimpang dari rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS tidak dilakukan tanpa perencanaan yang jelas, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata dan skala prioritas yang jelas.

Berdasarkan temuan tersebut, pengelolaan dana BOS menunjukkan adanya keterkaitan antar tahapan yang saling mendukung dalam mencapai pengelolaan keuangan yang efektif. Penggunaan data sebagai dasar perencanaan menunjukkan bahwa keputusan yang diambil melihat kesesuaian dengan kondisi sekolah. Selain itu, skala prioritas dan fleksibilitas dalam penggunaan dana menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang adaptif, namun tetap patuh pada aturan yang berlaku. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pengendalian juga memperkuat akuntabilitas serta meminimalisir potensi kesalahan. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS di sekolah telah mencerminkan praktik tata kelola keuangan yang baik dan terarah.

141

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, audit pendidikan berperan penting dalam memastikan pengelolaan dana BOS berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui fungsi peran sebagai watchdog, consulting, catalyst, serta (assurance) pemberian keyakinan atas kewajaran laporan keuangan. Pelaksanaan audit di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo menunjukkan bahwa peran assurance lebih dominan, yang dimana ditunjukkan dari tidak ditemukannya temuan signifikan serta kesesuaian pengelolaan dana dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi telah diterapkan melalui keterbukaan laporan keuangan kepada pihak internal dan eksternal, serta didukung oleh penggunaan sistem digital dalam pengadaan dan pencatatan yang memungkinkan proses keuangan lebih mudah dipantau. Akuntabilitas juga tercermin dari sistem pelaporan yang terstruktur dan terintegrasi, sehingga setiap transaksi dapat dicatat dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Selain itu, pengelolaan dana BOS dilakukan melalui tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan berbasis data, pelaksanaan berdasarkan skala prioritas, hingga pengendalian dan evaluasi, sehingga mampu mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.